

DAFTAR PUSTAKA

- Asyrul Fikri, Anju Nofarof Hasudungan. (2022). Nasionalisasi-Investasi Perusahaan Asing, Mafia Berkeley dan Berakhirnya Rezim Presiden Soekarno. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(2), 46–60.
- Azizah Mahirah Rizki, dkk. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen. *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi*, 281.
- Black, M. (1984). *The Importance of Language*. New York: Cornell University Press.
- Cinta Annata Nurhan, Rizky Sri, dkk. (2024). RELEVANSI FUNGSI PENAFSIRAN GRAMATIKAL DALAM MEMAHAMI HUKUM. *KULTURA Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 276.
- Dian Ratu, Anggita Doramia. (2022). Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 238.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fajri, M. M. (2024). *Kemendag Revisi Aturan Ekspor Pasir Laut Berdasarkan PP Nomor 26/2023*. Jakarta: InfoPublik.
- Hapsari, Nurhayati. (2023). Peran Penting Perdagangan Internasional dalam Esport di Jawa Timur. *IMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 1235-1248.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marzuki, P. D. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Nasional, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha, K. P. (2024). Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26. *QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN Vol 6*, 50.
- Ombudsman, K. (2023). *Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti*. Jakarta: Ombudsman RI.

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Principles and Processes* (4th ed.). Oxford University Press.
- P, J., & SM, M. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Patricia Birnie, Alan Boyle, . (1992). *International Law and the Environment*. Clarendon Press, Oxford.
- Purwaka, T. H. (2014). Peluang Menurut Unclos Dan Hukum Positif Indonesia Untuk Membuka Kembali Ekspor Pasir Laut Ke Singapura. *Jurnal Dinamika Hukum* .
- Radhitya Erlangga, Sukri , Ariana. (2022). Konflik Sosial Masyarakat Nelayan Pulau Kodingareng – Pt. Royal Boskalis Atas Penambangan Pasir Laut Di Pesisir Kota Makassar. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 78–90.
- Soekanto, S., & Mamudji, d. S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Srimega Nurmaya , dkk. (2024). Ekspor Pasir Laut di Indonesia: Dilema Dampak Lingkungan dan Pendapatan Negara. *BLC Juris Civilis*, -.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* . bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suroso, E. (2020, 03 17). *Dampak Penambangan Pasir Laut*. Lampung: Universitas Lampung.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Winarno, B. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS
- Yulia, D. (2016). Sejarah Perkembangan Suku Laut di Tanjung Gundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung Batam Tahun 1982-2012. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 139-152.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

UU No. 1 Tahun 2017 mengenai Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

WEBSITE & MEDIA

Idris, M. (2024) "Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut: Pulau RI Hilang, Singapura Makin Luas"

<https://money.kompas.com/read/2024/09/13/141245926/sejarah-kelam-ekspor-pasir-laut-pulau-ri-hilang-singapura-makin-luas?page=all>.

Ambari, M. (2024). "Kontroversi ekspor pasir laut: Ancaman lingkungan atau peluang ekonomi? Mongabay Indonesia. Diakses pada 24 September 2024, dari Mongabay.co.id

<https://www.mongabay.co.id/2024/09/24/kontroversi-ekspor-pasir-laut-ancaman-lingkungan-atau-peluang-ekonomi/>

CNN Tim (2023) "Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut"

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230530070825-92-955547/daftar-3-menteri-di-pusaran-izin-keruk-dan-ekspor-pasir-laut>.

Perdana, A. P. (2023) “Kementerian ESDM: Izin Tambang Pasir Laut Kewenangan Daerah”

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/26/kementerian-esdm-izin-tambang-pasir-laut-kewenangan-daerah>.

Tempo Tim. (2024) Puluhan Perusahaan Daftar Izin Pengerukan Pasir Laut.

<https://www.tempo.co/ekonomi/puluhan-perusahaan-daftar-izin-pengerukan-pasir-laut-9646>

Grahadyarini, L. (2024) “Gelar Konsesi Penambangan Pasir Laut, Pemerintah Buka Pendaftaran Pengusaha”

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/17/miliaran-kubik-sedimentasi-laut-ditawarkan-ke-pelaku-usaha>

Wuryasti, F. (2024) “Presiden Jokowi: Yang Diekspor Itu Sedimen, bukan Pasir Laut” <https://mediaindonesia.com/ekonomi/701724/presiden-jokowi-yang-diekspor-itu-sedimen-bukan-pasir-laut>

JDIH Marves. (2023) “PP 26/2023: Pengelolaan Hasil Sedimen di Laut” <https://jdih.maritim.go.id/pp-262023-pengelolaan-hasil-sedimen-di-laut>

WALHI. (2023) “Cabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta moratorium permanen tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia” <https://walhijatim.org/2023/05/31/cabut-pp-no-26-tahun-2023-tentang-pengelolaan-hasil-sedimentasi-di-laut-serta-moratorium-permanen-tambang-pasir-laut-dan-reklamasi-pantai-di-indonesia/>

Hotroom (2023) “Ekspor Pasir Laut, Pentingnya Ekonomi atau Ekosistem?”

Youtube. https://youtu.be/D8_QK1GiTI8?si=gE3QIQLUaiK26n2T